Volume 9 No. 1 Juni 2026
P-ISSN: 2621-2765 (Cetak) I E-ISSN: 2621-3532 (Online)

at-tamkin
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Aksi Tanam Mangrove dalam Kebijakan Pengelolaan Daerah Pesisir Di Kabupaten Malang

Dewi Ambarwati[1], Muhammad Imron[2], Dafis Ubaidillah Assiddiq[3*], Husnul Hakim[4], Sri Handayani[5],
[1,2,3,4,5]Universitas Islam Raden Rahmat
*Corresponding Author: dafis.assiddiq@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman edukasi partisipatif bersama masyarakat dan mahasiswa agar dapat melestarikan ekosistem pesisir berupa hutan mangrove. Kegiatan ini dilaksanakan dengan aksi penanaman bibit mangrove bersama tokoh adat dan warga lokal serta berdialog langsung perihal edukasi kearifan masyarakat pesisir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan aksi ekologis dengan nilai budaya lokal mampu membangun kesadaran kolektif dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat dan juga mahasiswa terhadap lingkungan. Kegiatan ini merekomendasikan pentingnya menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai strategi berkelanjutan dalam pelestarian ekosistem pesisir, serta perlunya pelibatan generasi muda dalam aksi lingkungan.

Kata Kunci: mangrove, masyarakat pesisir, kearifan lokal, lingkungan, tradisi.

ABSTRACT

This community service activity was conducted in Sidodadi Village, Gedangan District, Malang Regency, with the aim of providing a participatory educational experience for the community and students to conserve the coastal mangrove ecosystem. The activity involved planting mangrove seedlings alongside traditional leaders and local residents, as well as engaging in direct dialogue regarding the wisdom of coastal communities. The results indicate that an approach integrating ecological action with local cultural values fosters collective awareness and strengthens the sense of environmental ownership among both the community and students. The activity highlights the importance of revitalizing local wisdom as a sustainable strategy for coastal ecosystem conservation and underscores the need to involve the younger generation in environmental initiatives.

Keywords*: mangrove, coastal community, local wisdom, environment, tradition.*

PENDAHULUAN

Eksistensi lingkungan yang baik memiliki peranan penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia secara umum. Manusia dapat bertahan hidup dan memiliki kualitas hidup yang baik apabila ingkungan tempat tinggalnya berkualitas, seperti kualitas oksigen yang baik, adanya keseimbangan ekosistem hingga pengolahan sampah maupun limbah yang tepat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa akibat dari perkembangan teknologi dewasa ini juga berdampak pada bagaimana mayarakat berperilaku dan melestarikan lingkungan itu sendiri. Ada aspek tepat guna yang diterapkan bagi kelesatrian lingkungan dan sebaliknya.

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

Selain penekanan bagi kualitas lingkungan yang bersinergi dengan alam, tentu aspek sumber daya manusia sangat berperan penting. Kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan lingkungan saat ini juga harus memperhatikan pengelolaan alam yang berkelanjutan. Artinya, masyarakat dalam mengelola dan melestarikan alam juga dapat memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi di suatu daerah tertentu. Adanya pengahrgaan dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai kearifan lokal inilah yang secara langsung dapat berkontribusi nyata bagi pelesatrian lingkungan.

Berkelindan dengan hal tersebut, salah satu elemen utama yang memegang peranan penting adalah ekosistem pesisir yang berupa hutan mangrove. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, penyangga keanekaragaman hayati, serta sumber penghidupan masyarakat. Potensi ekosistem hutan mangrove meliputi potensi fisik, ekonomi dan maupun ekologi. Potensi fisik hutan mangrove yaitu sebagai proteksi dari abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang, pencegah intrusi air laut ke darat, perluasan lahan ke arah laut dan memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air) sehingga dapat mencegah pencemaran air tambak. Potensi ekologi hutan mangrove yaitu seagai habitat berbagai jenis fauna, sebagai tempat pemijahan (spawning ground), daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makan (feeding ground) bagi organisme di sekitarnya dan penyedia pakan bagi biota laut, seperti udang dan kepiting. Penyerap CO2 dan penghasil O2 yang relatif tinggi.(Rom et al., 2023)

Indonesia adalah rumah bagi sekitar 20 persen mangrove dunia, luasnya mencapai 3,44 juta hektar, berdasarkan National Mangrove Map 2024. Dari 40 lokasi mangrove paling penting di dunia, 12 di antaranya berada di kepulauan Indonesia. Fakta itu saja sudah cukup menjadikan Indonesia aktor utama dalam gerakan global Mangrove Breakthrough, sebuah inisiatif yang menargetkan perlindungan dan restorasi 15 juta hektar mangrove dunia pada 2030. Namun capaian ini baru awal. Laporan Mangrove Breakthrough menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan restorasi dan konservasi mangrove pada RPJMN 2025–2029 mencapai Rp47,6 triliun (USD 2,85 miliar). Sayangnya, baru kurang dari 20 persen yang terjamin. Inilah yang disebut sebagai finance gap, jurang besar yang hanya bisa dijembatani lewat kemitraan kreatif melalui blended finance, pasar karbon biru, hingga kerjasama bilateral dan multilateral. Tantangan lainnya juga tentang alih fungsi lahan menjadi tambak, sawit, dan infrastruktur. (Mangrove Breakthrough Menjaga 20 Persen Hutan Mangrove Dunia Untuk Masa Depan - Wetlands International Indonesia, n.d.) Wilayah Sumatra, Sulawesi dan Jawa Timur misalnya terdapat akibat konversi tambak udang yang dikenal sebagai “revolusi biru”, penebangan dan konversi lahan untuk pertanian atau tambak garam serta degradasi akibat tumpahan minyak dan polusi (Kalimantan Timur).(Murdiyarso et al., 2015)

Kawasan hutan mangrove juga terdapat di Kabupaten Malang, tepatnya di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bajulmati, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Kondisi mangrove di wilayah ini mengalami penurunan akibat minimnya kesadaran kolektif dalam pelestariannya, serta minimnya regenerasi nilai-nilai lokal yang mendukung pelestariannya. Ekosistem mangrove merupakan salah satu benteng alami penting yang melindungi kawasan pesisir dari abrasi, gelombang tinggi, serta intrusi air laut. Selain berperan secara ekologis, hutan mangrove juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang besar bagi masyarakat pesisir.

Dalam konteks lokal, masyarakat Desa Sidodadi sebenarnya memiliki modal sosial berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dihidupkan kembali untuk mendukung konservasi mangrove. Kearifan tersebut meliputi praktik-praktik tradisional yang menghormati alam, budaya gotong royong dalam

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

mengelola sumber daya, serta pandangan filosofis terhadap hubungan manusia dan lingkungan. Sayangnya, nilai-nilai ini perlahan terkikis oleh perkembangan zaman dan kurangnya regenerasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak hanya menanam mangrove secara fisik, tetapi juga menanam kembali kesadaran budaya dan nilai lokal dalam jiwa masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong pentingnya gerakan rehabilitasi mangrove yang tidak hanya bersifat teknis atau ekologis, melainkan juga kultural dan partisipatif. Dalam konteks ini, penguatan kembali kearifan lokal menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa pelestarian mangrove tidak berhenti pada penanaman semata, melainkan tumbuh dari kesadaran dan nilai-nilai yang telah mengakar dalam budaya masyarakat pesisir. Masyarakat Desa Sidodadi sendiri memiliki berbagai praktik lokal yang berpotensi menjadi modal sosial dalam konservasi lingkungan, seperti gotong royong, larangan adat, dan pandangan filosofis terhadap hubungan manusia dan alam.

Untuk itu, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang ini diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui aksi tanam mangrove yang berbasis pada penguatan kearifan lokal. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wahana pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari perwujudan tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian yang adaptif bagi masyarakat. Dosen dan mahasiswa terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, sehingga kegiatan ini juga menjadi proses pembelajaran langsung di lapangan.

Tujuan dari aksi tanam mangrove ini tidak hanya diharapkan dapat berdampak terhadap pemulihan ekosistem saja, tetapi juga mampu membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga pesisir sebagai warisan budaya dan alam yang harus dilestarikan. Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah, partisipatif, dan kultural, kegiatan ini menjadi model pengabdian masyarakat yang relevan dengan konteks lokal dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan aktif mahasiswa juga mendorong terbentuknya generasi akademik yang peduli terhadap lingkungan dan peka terhadap nilai-nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Metode pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang sebagai pelaku utama dalam pelestarian lingkungan melalui aksi tanam mangrove. Lokasi penanaman dipilih di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bajulmati, dengan mempertimbangkan kondisi ekologis yang mendukung keberhasilan rehabilitasi mangrove. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh dosen, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang dan masyarakat Desa Sidodadi, sehingga kegiatan pengabdian ini sekaligus menjadi media pembelajaran dan pengembangan keilmuan bagi civitas akademika.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengadakan diskusi yang bersifat edukatif dan dialogis bersama masyarakat mengenai pentingnya mangrove dari sisi ekologis sekaligus mengenalkan kearifan lokal yang selama ini dijalankan masyarakat dalam menjaga pesisir. Setelah itu, aksi tanam mangrove dilakukan secara gotong royong, mempererat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

lingkungan. Pada tahap akhir, dilakukan refleksi bersama masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan sekaligus menyusun rencana tindak lanjut berupa monitoring dan perawatan bibit mangrove.

Dokumentasi seluruh proses pengabdian menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk kegiatan serupa di masa depan. Pendekatan partisipatif ini diharapkan tidak hanya berhasil dalam aspek rehabilitasi lingkungan, tetapi juga memperkuat eksistensi kearifan lokal sebagai pondasi sosial-ekologis yang kokoh di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

PELAKSANAAN/IMPLEMENTASI KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan akibat adanya keresahan dan kekhawatiran warga dan juga mahasiswa peduli lingkungan di UNIRA Malang terhadap kondisi hutan mangrove di kawasan DAS Bajulmati. Adanya kondisi kawasan mangrove yang tidak optimal serta tidak adanya dukungan dari pemerintah desa setempat mengakibatkan kawasan hutan ini menjadi gersang dan minim pengelolaan. Seharusnya, peran pemeritah desa setempat dan masyarakat mampu mengelola kawasan hutan mangrove di DAS Bajulmati lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga desa setempat dan menyeimbangkan ekosistem pesisir.

Teori Hungtington dan Nelson. Parisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan desa merupakan termasuk ke dalam kategori partisipasi politik. Karena di dalamnya salah satu kegiatan warga adalah yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempenagruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat disini bisa bersifat individual ataupun kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif dengan segala indikator yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Hal ini sejalan dengan pendapat ahli sosiologi Cohendan Uphoff (2015:61), menjabarkan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : *Pertama,* Partisipasi dalam pengambilan Keputusan Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan Masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena Masyarakat menuntut ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti : hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua,* Partisipasi dalam pelaksanaan ; Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pelaksanaan program. *Ketiga,* Partisipasi dalam pengambilan manfaat Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output.Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. *Keempat,* Partisipasi dalam evaluasi Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

Peran serta dari pemerintah desa dapat berupa kebijakan yang mendukung secara penuh dengan aksi nyata pemeliharaan lingkungan serta bersinergi dengan masyarakat dan juga para akademisi sekitar. Pada dasarnya, kebijakan adalah sebuah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.(Marzali, 2012) Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.(Wahab, 2008)

Berdasarkan teori kebijakan publik, terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. *Pertama*, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. *Kedua*, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. *Ketiga*, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. *Keempat,* bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. *Kelima* tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.(Tahir, 2011)

Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati alam yang didominasi pepohonan dalam suatu komunitas dan lingkungan alam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain adalah definisi hutan dalam Undang-Undang Nomor 41. Undang-Undang tersebut mendefinisikan hutan sebagai "kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi pepohonan dalam suatu komunitas dan lingkungan alam", yang mencerminkan perspektif biofisik hutan.Undang-undang tersebut tidak menyebutkan tujuan pengelolaan atau fungsi ekologis. Hutan didefinisikan oleh pemerintah sebagai "hamparan padang rumput yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan kesatuan masyarakat alamiah kehidupan dan lingkungan alamnya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan." Status hukum tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Pengelolaan hutan, menurut Helms (1998) dalam Suhendang (2013), adalah setiap tindakan pengelolaan yang dilakukan terhadap sumber daya hutan dengan tujuan untuk memperoleh barang, manfaat, dan nilai sebesar-besarnya dengan tetap menjaga kelestariannya untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Menurut Aksornkoae (1993), mangrove merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis, hidup di dekat pantai, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan Mangrove: sejenis hutan yang komunitasnya yang berkembang dapat menahan garam yang tumbuh di tempat-tempat pasang surut yang tergenang pada saat pasang dan tidak pada saat surut, terutama di pantai-pantai yang terlindung dan laguna-laguna muara. Makhluk-makhluk (flora dan fauna) yang menyusun ekosistem mangrove berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi terbaik untuk pertumbuhan mangrove adalah daerah pesisir berlumpur dengan arus air yang kecil, di mana aliran sungai menyediakan air tawar. Sekelompok tumbuhan

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

tropis dan subtropis yang dikenal sebagai hutan mangrove tumbuh subur di daerah pasang surut dengan tanah anaerobic.

Secara normatif, pengelolaan wilayah pesisir merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi. Kebijakan pengelolaan pesisir mengandung prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan ekosistem. Aksi tanam mangrove dalam kegiatan ini menjadi bentuk konkret implementasi prinsip tersebut. Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai langkah rehabilitasi ekologis, tetapi juga sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan lingkungan berbasis masyarakat.

Dalam perspektif efektivitas kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan di dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum lingkungan melalui pendekatan edukatif dan praksis.

Bentuk Tipe partisipasi menurut Yadav dalam Theresia (2015:198) dapat juga dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yakni, Pertama, Partisipasi Informasi. Pada tahap ini, masyarakat hanya diberi informasi mengenai program pengelolaan hutan mangrove. Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan. Kedua, Partisipasi Konsultasi. Masyarakat diajak untuk memberikan masukan dan pendapat mengenai programyang akan dilaksanakan. Namun, keputusan akhir tetap di tangan pihak pengelola. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ketiga, Partisipasi Aktif. Bentuk partisipasi yang paling tinggi, di mana masyarakat terlibat dalam semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam konteks pengelolaan hutan mangrove, masyarakat dapat berperan dalam menentukan lokasi penanaman, jenis pohon yang akan ditanam, serta cara pemeliharaan hutan mangrove.

Gambar 1. Proses dikusi dan edukasi mahasiwa bersama tokoh adat setempat

Kegiatan dilaksanakan di sebuah pendopo terbuka dengan melibatkan masyarakat pesisir, perangkat desa, serta tim akademisi. Suasana diskusi yang partisipatif menunjukkan adanya ruang

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

dialog antara akademisi dan masyarakat mengenai pentingnya mangrove dalam konteks kebijakan pengelolaan pesisir. Terlihat pula adanya keterlibatan masyarakat secara langsung yang mencerminkan pendekatan *bottom-up governance* dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam perspektif kebijakan publik, pengelolaan pesisir yang efektif mensyaratkan: partisipasi masyarakat lokal, Kolaborasi pemerintah desa dan kabupaten serta adanya dukungan akademisi sebagai *knowledge provider*. Dari kegiatan ini menunjukkan integrasi model triple helix (akademisi–pemerintah–masyarakat) yang berfungsi sebagai media internalisasi kebijakan ke dalam konteks kesadaran hukum masyarakat (legal awareness).

Setelah kegiatan diskusi selesai, peserta kegiatan bersama-sama membawa bibit mangrove untuk melakukan kegiatan penanaman. Kegiatan aksi tanam mangrove yang terlihat pada gambar menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya rehabilitasi kawasan pesisir. Peserta turun langsung ke lokasi yang tergenang air payau untuk menanam bibit mangrove secara bersama-sama. Aktivitas ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga memperlihatkan adanya semangat kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir Kabupaten Malang.

Partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menjadi indikator penting keberhasilan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan keterlibatan langsung di lapangan, masyarakat tidak sekadar menerima sosialisasi secara teoritis, melainkan mengalami proses pembelajaran praktik yang memperkuat pemahaman tentang fungsi mangrove sebagai penahan abrasi, penyaring alami, serta habitat biota pesisir. Pendekatan ini efektif dalam membangun kesadaran ekologis sekaligus rasa tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan wilayah pesisir.

Kegiatan untuk mencapai tujuan merupakan bagian dari manajemen, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerahkan upaya terbaiknya dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Seperti di masyarakat Sidodadi, khususnya yakni *Pertama*, pengorganisasian masyarakat dimulai dengan penilaian kebutuhan dan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Hal ini penting untuk memahami kondisi ekologis dan sosial ekonomi yang ada, serta tantangan yang perlu diatasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hutan mangrove. Adanya organisasi atau komunitas di Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan mangrove. Melalui rapat-rapat rutin, konsultasi publik, atau forum komunitas lainnya. *Kedua*, pengorganisasian masyarakat juga mencakup pembentukan struktur organisasi yang jelas, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Menurut teori pengelolaan berbasis masyarakat, keterlibatan semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya sangat penting untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan perwakilan kelompok lain perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi. Kelompok ini dapat terdiri dari para petani, nelayan, pemuda, atau perwakilan dari komunitas lokal lainnya. Ketika komunitas hadir di desa Sidodadi, mereka seharusnya bisa membagi fokus pada permasalahan yang ada dan juga fungsi dari komunitas yang hadir dimasyarakat upaya nya untuk menampung aspirasi dan membuat gerakan-gerakan untuk

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

memelihara desa dan juga sumberdaya alam khususnya hutan mangrove. *Ketiga*, penggalangan dukungan dari masyarakat setempat menjadi langkah krusial dalam pengorganisasian. Komunikasi yang efektif mengenai manfaat dan tujuan dari pemeliharaan hutan mangrove dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan mereka, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pemeliharaan. *Keempat*, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga merupakan bagian integral dari pengorganisasian masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang ekosistem mangrove, teknik pemeliharaan, dan manfaat jangka panjang dari keberadaan hutan mangrove. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pengembangan kesadaran masyarakat akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengorganisasian masyarakat dalam pemeliharaan hutan mangrove tidak hanya berfokus pada aspek fisik pengelolaan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas dan kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan pengelolaan hutan mangrove dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Gambar 2. Proses penanaman benih mangrove bersama mahasiswa dan masyarakat

Aksi tanam mangrove ini merupakan bentuk implementasi konkret prinsip partisipasi dalam tata kelola lingkungan. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan daerah pesisir tidak dapat hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi membutuhkan dukungan sosial dan komitmen masyarakat sebagai subjek kebijakan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan lingkungan dan mendorong keberlanjutan program konservasi pesisir di Kabupaten Malang.

Pengelolaan hutan mangrove memiliki beberapa tujuan penting, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengelolaan hutan mangrove yakni *Pertama*, Konservasi dan Perlindungan Ekosistem. Hutan mangrove memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting, termasuk sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, serta sebagai penyangga untuk melindungi pantai dari erosi dan bencana alam seperti tsunami dan badai. *Kedua*, Peningkatan Kualitas Lingkungan. Mangrove berperan dalam menjaga kualitas air dengan menyaring polutan dan limbah, serta mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida. *Ketiga*, Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Pengelolaan yang baik

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

memungkinkan pemanfaatan sumber daya hutan mangrove, seperti kayu, hasil laut, dan produk-produk non-kayu, secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.Ketiga, Pemulihan dan Rehabilitasi. Melalui pengelolaan, hutan mangrove yang telah terdegradasi dapat dipulihkan dan direhabilitasi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan manfaatnya. *Keempat*, Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Lokal. Pengelolaan mangrove yang efektif dapat menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas lokal melalui kegiatan seperti budidaya ikan, pariwisata ekologi, dan pengumpulan produk non-kayu. *Kelima*, Penelitian dan Pendidikan. Hutan mangrove juga merupakan area penting untuk penelitian ilmiah dan pendidikan tentang ekosistem pesisir, perubahan iklim, dan konservasi. *Keenam*, Adaptasi Perubahan Iklim Mangrove berfungsi sebagai buffer alami terhadap dampak perubahan iklim dengan mengurangi dampak gelombang laut dan meningkatkan ketahanan komunitas pesisir terhadap perubahan iklim. Pengelolaan hutan mangrove yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, dan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan lingkungan dan sosial-ekonomi.

Hasil partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dianalisis melalui berbagai teori yang menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu teori yang relevan adalah teori pengelolaan berbasis masyarakat (*Community-Based Natural Resource Management*) yang dikemukakan oleh Elinor Ostrom, seorang ahli terkenal dalam bidang ekonomi dan ilmu politik. Ostrom menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan mangrove, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal.

Gambar 3. Peletakan tanda kegiatan dari UNIRA Malang untuk masyarakat

Peletakan tanda kegiatan pada akhir rangkaian aksi tanam mangrove merupakan simbol komitmen bersama antara akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir. Penanda tersebut tidak sekadar menjadi dokumentasi fisik, tetapi juga merepresentasikan kesepakatan moral bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki tujuan jangka panjang, yaitu perlindungan dan pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Dengan adanya

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

tanda ini, lokasi penanaman memiliki identitas yang jelas sebagai kawasan rehabilitasi berbasis partisipasi masyarakat.

Secara sosial, peletakan tanda kegiatan memperkuat legitimasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program konservasi yang telah dilakukan. Penanda tersebut berfungsi sebagai pengingat kolektif bahwa aksi tanam mangrove bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan bagian dari gerakan berkelanjutan yang membutuhkan perawatan dan pengawasan bersama. Dalam konteks pemberdayaan, simbol ini dapat mendorong konsistensi partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memantau pertumbuhan mangrove yang telah ditanam.

Dalam perspektif kebijakan pengelolaan daerah pesisir, peletakan tanda kegiatan juga memiliki makna strategis sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi program pengabdian. Tanda tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara nyata di lapangan serta dapat dijadikan referensi untuk tindak lanjut kebijakan desa atau daerah terkait konservasi pesisir. Dengan demikian, penutup kegiatan melalui peletakan tanda tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung nilai administratif, edukatif, dan keberlanjutan kebijakan lingkungan di Kabupaten Malang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema aksi tanam mangrove di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, merupakan upaya nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir sekaligus penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif sebagai penggerak utama dalam proses konservasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan menjadi kunci keberhasilan aksi ini, sekaligus membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di sekitar DAS Bajulmati.

Pengorganisasian masyarakat dalam pemeliharaan hutan mangrove merupakan aspek krusial dalam pemeliharaan hutan mangrove. Melalui pengorganisasian yang baik, masyarakat dapat berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan merawat ekosistem mangrove. Pembentukan kelompok masyarakat di Desa Mayangan telah berhasil membentuk kelompok-kelompok yang fokus pada pemeliharaan hutan mangrove. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, sehingga meningkatkan efektivitas kegiatan pemeliharaan dan memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi bagian integral dari pengorganisasian masyarakat. Masyarakat diberikan pengetahuan tentang ekosistem mangrove, teknik pemeliharaan, dan manfaat jangka panjang dari keberadaan hutan mangrove. Hal ini meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan menciptakan kesadaran akan pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan mereka. Pengorganisasian masyarakat dalam pemeliharaan hutan mangrove tidak hanya berdampak pada keberhasilan program pemeliharaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dan lingkungan yang lebih baik, seperti peningkatan pendapatan dari ekowisata dan pelestarian sumber daya alam.

P-ISSN: 2621-2765
E-ISSN: 2621-3532

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan dengan adanya penggabungan antara pendekatan ilmiah, partisipatif, dan budaya lokal telah membuktikan bahwa konservasi tidak harus selalu bersifat teknokratis, melainkan dapat menjadi gerakan sosial yang berakar kuat pada tradisi dan nilai-nilai komunitas. Dalam prosesnya, mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat (FISIP UNIRA) Malang juga memperoleh pembelajaran langsung tentang dinamika sosial, peran masyarakat, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam kegiatan pengabdian. Selain itu, dari kegiatan ini juga dihasilkan rencana kegiatan lanjutan yang melibatkan mahasiswa dan mayarakat serta pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang lebih pro lingkungan di kawasan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) beserta PRBRISDE UNIRA Malang yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Mangrove Breakthrough Menjaga 20 Persen Hutan Mangrove Dunia untuk Masa Depan - Wetlands International Indonesia. (n.d.). Retrieved March 2, 2026, from https://indonesia.wetlands.org/id/mangrove-breakthrough-menjaga-20-persen-hutan-mangrove-dunia-untuk-masa-depan/

Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencama Prenada Media Group.

Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M. W., Sasmito, S. D., Donato, D. C., Manuri, S., Krisnawati, H., Taberima, S., & Kurnianto, S. (2015). The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*, *5*(12), 1089–1092. https://doi.org/10.1038/NCLIMATE2734

Rom, M., Fikri, A., Sam, M., Lestari, Z. A., Rahmawati, T. D., Agribisnis, P., Pertanian, F., Singaperbangsa, U., Timur, T., Barat, J., & Wetan, K. C. (2023). Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Sumber. *Jurnal Abditani*, *6*(1), 6–10.

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Indonesia.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.